

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk dan proses mobilitas penduduk menuju daerah perkotaan di Indonesia semakin meningkat dengan pesat, ditunjukkan oleh angka pertumbuhan penduduk kota yang sangat tinggi, utamanya terjadi pada periode tahun 1980-1990 (7,85 persen per tahun). Tingkat pertumbuhan penduduk kota turun tajam menjadi 2,01 pada periode 1990-2000, tetapi dilihat persentase penduduk yang tinggal di kota tampak semakin meningkat dengan pesat. Sensus Penduduk Indonesia menunjukkan, persentase penduduk kota di Indonesia pada tahun 1980 hanya sebesar 22,38 persen, angka tersebut telah meningkat menjadi 35,91 persen pada tahun 1990. Sepuluh tahun kemudian (2000), persentase penduduk kota di Indonesia telah mencapai sebesar 42,43 (BPS, 1982, 1992 dan 2001)¹

Pada dasarnya kota menjadi pusat pembangunan sektor formal, maka kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa. Kota bagaikan mempunyai kekuatan magis yang mampu menyedot warga desa, sehingga terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kondisi tersebut di atas dikenal dengan teori faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*) dalam urbanisasi. Akan tetapi kota tidak seperti apa yang diharapkan

¹ Rachbini, Didik, J dan Abdul Hamid. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua*, Jakarta : LP3ES. hlm. 15.

kaum migran. Tenaga kerja yang banyak tidak bisa sepenuhnya ditampung sektor formal. Lapangan kerja formal yang tersedia mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja yang tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor informal.

Fakta yang dapat dilihat adalah adanya ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sektor informal yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja.²

Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan adalah pedagang kaki lima (PKL). Dengan adanya keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, pedagang kaki lima menjadi pilihan yang termudah untuk bertahan hidup. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari sektor informal yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat, bergantung pada sumber daya lokal dan skala usaha yang relatif kecil.³

Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi

² Effendi, Tadjuddin Noer, 2000, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta, Tiara Wacana. hlm. 46.

³ Agung Ridlo, Mohammad, 2001, *Kemiskinan di Perkotaan*, Semarang, Unissula Press. hlm. 25.

tempat umum. Akan tetapi adanya kebutuhan terhadap pedagang kaki lima oleh masyarakat menjadikan keberadaan para pedagang kaki lima pun semakin banyak. Masyarakat terutama yang kelas bawah masih membutuhkan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau.

Dengan demikian, merebaknya jumlah PKL bukan semata-mata karena keinginan para pedagang tadi untuk memperoleh pendapatan (*push factors*), tetapi lebih karena tuntutan pasar yang membutuhkan jasa PKL (*pull factors*). Disamping itu jenis usaha ini juga memberikan dampak ikutan yang menguntungkan (*positive spillovers*) seperti mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, membantu proses daur ulang beberapa jenis sampah, serta menjadi alternatif terbaik bagi kelompok berdaya beli rendah.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima mempunyai sisi positif, disamping sisi negatifnya. Hal ini merupakan dilema bagi pemerintah kota dalam mengatasi menjamurnya pedagang kaki lima. Disatu sisi keberadaan pedagang kaki lima dapat menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal sehingga dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran.

Disisi lain, keberadaan pedagang kaki lima memberikan kesan kotor, kumuh dan tidak tertib terhadap lingkungan perkotaan yang tidak diinginkan oleh pemerintah kota dalam menata kotanya. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta saja,

melainkan juga terjadi di kota Surakarta yang berada di Propinsi Jawa Tengah.

Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor formal juga menjadi salah satu sebab bertambahnya sektor informal. Semakin banyak para pedagang kaki lima di pusat-pusat keramaian kota menjadikan pemandangan kota bertambah tidak sedap dipandang lagi. Pemerintah Kota Surakarta sudah berusaha menata PKL berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan Daerah yang berlaku, namun pada kenyataannya permasalahan seputar pedagang kaki lima di Kota Surakarta menjadi permasalahan yang sangat pelik. Sejak dahulu Pemerintah Kota Surakarta permasalahan seputar pengelolaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Surakarta tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kawasan pedagang kaki lima yang ada di berbagai sudut kota di Surakarta. hal ini menimbulkan permasalahan telah lama tidak dapat diatasi.

Pemerintah Kota Surakarta di bawah pimpinan Bapak Joko Widodo belakangan melakukan penanganan yang tegas terhadap keberadaan pedagangan kaki lima yang ada di beberapa lokasi di kota Surakarta. salah satu kawasan pedagan kaki lima yang paling besar di kota Surakarta adalah di kawasan Monumen Banjarsari. Pemerintahan Kota Surakarta belakangan telah melakukan relokasi terhadap semua pedagang kaki lima yang ada di kawasan tersebut. Meskipun dalam pelaksanaannya mengalami banyak tantangan dan hambatan serta permasalahan, tetapi akhirnya kebijakan

Pemerintah Kota Surakarta untuk melakukan relokasi terhadap keberadaan pedagang kaki lima yang ada di kawasan tersebut akhirnya dapat dilakukan.

Kebijakan relokasi terhadap keberadaan pedagang kaki lima yang ada di kawasan Monumen Banjarsari yang di pindahkan ke pasar Notoharjo Semanggi sesaat mendapatkan hambatan dari para pedagang kaki lima yang telah dipindahkan dari, di mana mereka mengeluh pendapatan mereka berkurang setelah menempati tempat baru karena di tempat yang baru yaitu di Pasar Notoharjo Semanggi masih sepi dari pengunjung..

Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam proses relokasi Pedagang Kaki Lima sejauh ini dapat dikatakan baik. Hal ini terbukti bahwa dari tim verifikasi nasional proses relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta termasuk proses yang baik. Terbukti dari proses relokasi pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta ini tanpa terdapat adanya kekerasan.⁴

Keberhasilan pemerintah kota Surakarta dalam melakukan relokasi pedagang kaki lima yang ada di kawasan Monumen Banjarsari ke Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi merupakan simbol keberhasilan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan pedagang kaki lima. Dengan adanya relokasi ini dapat dilihat sekarang kawasan Monumen Banjarsari kini terlihat lebih indah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak mengangkat permasalahan seputar relokasi terhadap pedagang kaki lima yang ada di di

⁴ Joglosemar, 22 Mei 2010.

kawasan Monumen Banjarsari ke Pasar Klitikan Nitiharjo Semanggi sebagai bahan pembahasan dalam penelitian ini. Untuk itu dalam penelitian ini penulis memberikan judul penelitian ini : “MODEL RELOKASI PKL DALAM PERSPEKTIF KEINDAHAN DI KOTA SURAKARTA (Studi Kasus Pada Relokasi PKL di Surakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian tesis dari latar belakang seperti terurai di atas, maka permasalahan dalam penelitian tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan relokasi PKL yang ada di kawasan Monumen Banjarsari Surakarta ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan relokasi PKL yang ada di kawasan Monumen Banjarsari Surakarta ?
3. Bagaimana implikasi akibat adanya relokasi PKL di kawasan Monumen Banjarsari Surakarta ?
4. Bagaimana model relokasi PKL di Surakarta dalam perspektif keindahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan relokasi PKL yang ada di kawasan Monumen Banjarsari Surakarta.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan relokasi PKL yang ada di kawasan Monumen Banjarsari Surakarta.

3. Untuk mengetahui implikasi akibat adanya relokasi PKL di kawasan Monumen Banjarsari Surakarta.
4. Untuk mengetahui model relokasi PKL di Surakarta dalam perspektif keindahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang lain tentang model penyelesaian konflik seputar relokasi PKL.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu baik bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum seputar kebijakan pemerintah daerah dalam penataan PKL.
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pijakan bagi penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan penyelesaian konflik seputar relokasi PKL.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian dapat berjalan dengan lancar dan baik serta menghasilkan yang diharapkan apabila ditentukan lebih dahulu langkah-langkah yang diambil dalam melakukan penelitian yang sering disebut

sebagai metode penelitian. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti suatu “jalan ke”.⁵

Selanjutnya pengertian Penelitian Hukum sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁶

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian evaluasi menggunakan data primer, atau dikenal sebagai data yang dikumpulkan langsung dari tangan pertama atau langsung dari sumber data. Penggunaan data primer akan memberikan sebuah sudut pandang yang lebih baik dalam sumber data ketimbang penggunaan data sekunder. Selain itu penggunaan data primer akan menghasilkan sebuah pandangan yang jelas dan menyeluruh terhadap data penelitian evaluatif ini, selain juga mampu menjadi jiwa dari semua penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yaitu:

⁵ Soerjoko Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : VI Pres. Hlm 5.

⁶ *Ibid*, Hlm 43

- a. Dokumen. Dokumen merupakan sumber data penting yang digunakan peneliti disamping sumber data lainnya untuk menjawab problematika penelitian. Penggunaan dokumen dalam penelitian evaluasi ini akan didukung dan dikuatkan dengan wawancara terstruktur kepada narasumber.
- b. Narasumber atau informan. Narasumber atau informan menjadi sumber data yang penting dalam penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian evaluasi terhadap kebijakan publik terhadap kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam relokasi PKL yang ada di kawasan Monumen Banjarsari Surakarta, maka keberadaan narasumber menjadi sebuah hal yang relatif penting untuk menjelaskan proses pengambilan kebijakan sampai dengan pelaksanaannya.

Selain itu narasumber diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan mendalam terhadap kebijakan yang akan dievaluasi. Penelitian ini akan berusaha mewawancarai beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini, mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Tata Kota, Dinas Kebersihan, Pertamanan, Satpol PP juga warga masyarakat Kota Surakarta disekitar lokasi taman kota maupun yang biasa memanfaatkan keberadaan taman Kota yang ada. Namun demikian, penelitian ini tidak membatasi jumlah narasumber yang akan diwawancarai. Peneliti akan membatasi jumlah narasumber ketika peneliti merasa data yang diperoleh telah cukup

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian di wilayah Kerasidenan Surakarta Propinsi Jawa Tengah.

Dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa peneliti tertarik memilih lokasi penelitian karena peneliti ingin memberikan gambaran keberhasilan pemerintah daerah khususnya di dalam penataan pedagang kaki lima di daerahnya.
- b. Bahwa Peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di Jawa Tengah Khususnya Kerasidenan Surakarta karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang memiliki perkembangan perekonomian yang tinggi termasuk masalah pedagang kaki lima sehingga layak untuk dijadikan sample atau contoh dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b. Wawancara

Sebagai data primer maka wawancara dilakukan terhadap aparat pemerintahan yang berwenang dalam penataan pedagang kaki lima serta para pedagang kaki lima serta konsumen.

4. Validitas Data

Untuk pengembangan validitas penelitian, maka diperlukan sebuah teknik yang mampu mengukur derajat reliabilitas dari data yang diperoleh dari lapangan. Trianggulasi merupakan sebuah metode yang tepat untuk mengukur derajat reliabilitas dari sumber data yang akan diperoleh. Ada empat macam jenis trianggulasi yang bisa digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif. Pertama, trianggulasi sumber, digunakan untuk menggali data yang sama melalui sumber-sumber yang berbeda. Kedua, trianggulasi metode, yaitu suatu metode menggali data yang sama dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda. Ketiga, trianggulasi peneliti, yaitu jenis reliabilitas yang mengacu pada data yang didapat dari peneliti yang lain yang telah diuji validitasnya. Keempat, trianggulasi teori, yaitu cara mencapai reliabilitas dengan cara membandingkan perspektif teori yang berbeda untuk menjelaskan data-data yang berbeda.⁷

Penelitian evaluasi ini menggunakan bentuk trianggulasi sumber, yaitu menggali data yang sama melalui sumber-sumber yang berbeda.

⁷ HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, hlm. 93-98.

Karena sifat dari objek penelitian ini yang bersifat insidental maka triangulasi sumber menjadi syarat mutlak untuk menggali data. Triangulasi sumber yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan yang sama tentang kebijakan kepada narasumber yaitu dinas terkait, lalu mengulangi pertanyaan yang sama tersebut kepada narasumber yang berbeda dari dinas terkait lainnya. Hal itu dilakukan demi mendapatkan reliabilitas data yang valid.

5. Metode analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif.⁸ Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian evaluasi ini merupakan teknik analisis induktif yang berarti mengumpulkan hal-hal yang bersifat khusus untuk menyimpulkan kepada hal-hal yang bersifat umum. Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang bersifat deduktif yang berarti mengumpulkan hal-hal umum untuk menuju kepada hal-hal bersifat khusus. Sehingga pola pikir induktif tidak berusaha menggeneralisasi layaknya pola pikir deduktif, pola pikir induktif hanya berusaha menjelaskan dan menggambarkan sebuah fenomena tertentu.

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis yang biasa digunakan bersifat interaktif. Penggunaan sifat interaktif dalam penelitian kualitatif

⁸ Winarno Surakhmad. 1998. *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi*. Bandung : Tarsito. Hlm 16. Mengemukakan, analisis kualitatif adalah suatu analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis

mengharuskan pengumpulan data dilakukan bersamaan dengan analisis dan refleksi terhadap data-data penelitian yang berhasil dikumpulkan. Sifat interaktif dalam penelitian kualitatif memungkinkan adanya semacam interaksi yaitu berusaha dibandingkan dan diinteraksikan dengan unit-unit dan data-data lainnya demi tercapainya beragam tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian⁹. Penelitian kualitatif juga memiliki sifat siklus atau berputar. Sifat siklus memberikan sebuah keleluasaan untuk selalu memverifikasi data, menganalisis hingga penyusunan simpulan. Dalam proses siklus peneliti diberikan kebebasan untuk kembali mengumpulkan data ketika dirasakan data yang diperoleh belum memadai. Hal itu berkaitan dengan sifat penelitian kualitatif yang lentur dan terbuka. Hal tersebut dilakukan agar sebuah penelitian mendapatkan sebuah hasil yang kematapannya dapat dipertanggungjawabkan sebelum penulisan laporan yang lengkap. Kemudian, semua data yang berhasil dikumpulkan dari lapangan akan segera dianalisis, diinteraksikan juga dilakukan refleksi untuk menjelaskan keterkaitan antar data, demi mendapatkan sebuah hasil yang mantap dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk lebih jelasnya proses analisis interaktif dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam skema sebagai berikut:

⁹ Op.Cit. Sutopo, hlm. 107.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam mencapai maksud dan tujuan penulisan tesis, maka dalam sistematika penulisan laporan tesis dibuat pembahasan yang terbagi dalam beberapa bab.

BAB I merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan landasan teori-teori atau tinjauan pustaka yang berkaitan tentang konsep penataan PKL yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah dan Faktor-faktor yang mempengaruhi penataan ataupun relokasi pedagang kaki lima yang terjadi selama ini.

BAB III membahas tentang deskripsi wilayah yang menjadi tempat penelitian yaitu Propinsi Jawa Tengah khususnya Kerasidenan Surakarta, Implementasi penataan Pedagang kaki lima serta pengawasannya oleh pemerintah daerah di Propinsi Jawa Tengah khususnya Kerasidenan Surakarta.

BAB IV membahas tentang analisis model pelaksanaan relokasi PKL yang ada di kawasan Monumen Banjarsari Surakarta. Kendala dalam pelaksanaan relokasi PKL yang ada di kawasan Monumen Banjarsari Surakarta, implementasi kebijakan terkait dengan dampak relokasi PKL yang ada di kawasan Monumen Banjarsari Surakarta. Serta model relokasi PKL yang ada di Surakarta dalam perspektif keindahan.

BAB V berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran yang disampaikan penulis terkait dengan penelitian ini.